

BEDAH DISERTASI

JUDUL ASLI : KOTAWARINGIN [BORNEO] AU XIXE SIECLE: ETUDE ARCHEO-
HISTORIQUE SUR L'ETAT, LES CITES ET LE COMMERCE
UNIVERSITAS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, PARIS
KANDIDAT : MOH. ALI FADILLAH
TIM JURI : DR. MARCEL BONNEFF [PRESIDENT DE JURY]
 : PROF. DR. DENYS LOMBARD [MEMBRE]
 : PROF. DR. HASAN MUARIF AMBARY [MEMBRE]
 : DR. CLAUDE GUILLOT [MEMBRE]
TEMPAT : MAISON DE L'ASIE
 : 22, AVENUE DU PRESIDENT WILSON
 : 75116 PARIS, FRANCE
WAKTU : 20 DESEMBER 1996

ABSTRACT

**Kotawaringin [Borneo] in the Nineteenth Century,
The Historical Archaeological Study of State, Cities and Trade**

Kotawaringin [*Cotteringen*], situated on the South-West coast of Borneo, was one of the autonomous districts in the island of Kalimantan during the colonial period. According to the treaties that been sign in 1824 and 1878, the main principle of the Netherlands' colonial regime was to develop trade. The profit would be divided equally between the local authority and the Netherlands' government on the condition that the King of Kotawaringin and his nobles must be involved together in the program. The result was positive not only to note by the rise of the forest products but also the existence of new products such as gold, metal and marine product.

The population of Kotawaringin consists of two groups: Dayaks and Malays. The difference between the two groups is based on geographical occupation, religion, language, dress and custom. While the Dayaks have been considered as local people, since the Seventeenth Century the Malays, however, when looked at from the grass roots are considered as the immigrant group comes from Banjarmasin [South-East Kalimantan].

By their domination of the mouth of the main rivers, the Malays then established their politics and economics in the hinterland area. The « Exchange system » became established whereby the Dayaks must pay some amount of tribute or work as a voluntary worker for the King. The existence of the principality of Kotawaringin illustrates a distinct similarity with the Malay States of Sumatra, and shows that the viability depends on the relations with the hinterland.

KOTAWARINGIN [KALIMANTAN] PADA ABAD XIX:
KAJIAN ARKEOLOGI-SEJARAH TENTANG
NEGARA, KOTA DAN PERDAGANGAN

Pendahuluan

Kotawaringin sekarang adalah salah satu daerah administratif Indonesia yang terletak di barat-daya Kalimantan. Sampai tahun 1990, sekurang-kurangnya, Kotawaringin masih merupakan salah satu tempat yang luput dari program-program penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional [Puslit Arkenas], Jakarta. Dengan suka cita, saya menerima, ketika Drs. Suwedi Montana, yang pada waktu itu menjabat Kepala Bidang Arkeologi Islam, pada Puslit Arkenas, mempercayakan saya untuk memimpin sebuah tim kecil pada bulan Agustus 1990, untuk mengadakan sebuah penelitian eksploratif di Kotawaringin, khususnya di Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat, yang secara administratif termasuk wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

Perkenankan saya berterus terang, bahwa pada kesempatan pertama itu, saya merasa asing, karena merasa tidak mempunyai sedikitpun pengetahuan berkenaan dengan Kotawaringin dan sejarahnya. Dalam kebutaan, saya hanya mengetahui bahwa Kalimantan, termasuk juga Kotawaringin, meskipun sumber-sumber sejarah telah memberi tahu kita adanya sisa-sisa peradaban Hindu tertua di Kutei dan beberapa kesultanan di pesisir, tetapi dalam keseluruhannya, Kalimantan lebih banyak diperkenalkan para etnograf dan antropolog sebagai « rumah » grup etnik Dayak, dengan sejumlah sub-etniknya,

yang dipan-dang sebagai penduduk asli, penganut « paganisme » dan yang masih hidup dalam tradisi prasejarah.

Pengetahuan dan, terutama pandangan saya terhadap pulau itu mulai berubah setelah melakukan penelitian yang pertama tersebut, dan kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 1994. Yang paling menarik perhatian saya, adalah karena di Kotawaringin masih dapat ditemukan sisa-sisa peradaban Islam di tepi-tepi sungai yang mengalir ke selatan melewati belantara hutan yang lembab, sementara pada pelosok-pelosok desa, sebagaimana besar dihuni oleh kelompok-kelompok suku Dayak, yang berbeda agama, budaya dan adat istiadatnya dengan orang « Melayu » di pesisir. Di hadapan saya, pada situs-situs pemukiman muslim, masih ada sisa-sisa bangunan dan artefak yang dapat menjadi saksi bahwa sebuah kerajaan Islam pernah tumbuh, mulai dari awal abad XVII, dan berakhir pada pertengahan abad XX, tiga tahun setelah Ir. Soekarno memproklamakan kemerdekaan Indonesia.

Setelah saya tahu bahwa belum ada satu pun publikasi ilmiah tentang kerajaan itu, saya lalu menaruh harapan besar untuk memperkenalkannya kepada publik suatu periode yang panjang dari sejarah Kotawaringin. Sayangnya, saya menemukan betapa langkanya sumber-sumber sejarah berkenaan dengan jaman kuna Kotawaringin. Harapan saya satu-satunya lantas bertumpu pada data arkeologi. Namun,

hasil penelitian kami tidak jauh berbeda kualitasnya dengan data sejarah, baik sisa bangunan ataupun artefak yang ditemukan dalam survei atau ekskavasi, masih terlalu fragmentaris dan sebagian besar berasal dari abad XVIII-XIX. Hasil penelitian itu pada akhirnya mengharuskan saya untuk memfokuskan studi pada sejarah dan arkeologi Kotawaringin pada sekitar abad XIX dan mencoba membangun hipotesis untuk sejarah dan kekunaan Kotawaringin.

Permasalahan

Seperi kita ketahui, sebagian besar minat para sejarawan terhadap kepulauan Indonesia, sepanjang abad XIX, adalah terutama pada sejarah kolonial. Esensi pendekatannya khususnya diorientasikan pada peran bangsa-bangsa Eropa di negeri jajahan. Di sini saya ingin melihat Kotawaringin dari sudut pandang lain, bagaimana sebuah « negara kecil », boleh dibilang *périphérique* dibandingkan dengan raksasa Banjarmasin, Brunei, Aceh, Banten, Demak atau Makassar yang hampir serentak tumbuh pada abad XVI-XVII, memainkan perannya yang penting di bawah tekanan politik dan ekonomi Belanda dari awal abad XIX sampai awal abad XX. Politik kolonial Belanda mulai me-napak dengan tegas di Kotawaringin sejak penanda-tanganan kontrak pada tahun 1824 antara Halewijn, Residen Banjarmasin, dan Pangeran Ratu Imanuddin, raja ke-9 Kota-waringin. Perjanjian yang pertama itu telah menempatkan Kotawaringin di bawah kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Segala kebijakan politik kolonial sejak itu harus dipatuhi oleh raja. Untuk merealisasikan politik itu, Pemerintah Batavia telah mewa-kilkannya kepada Residen Banjarmasin. Pada awalnya, Kotawaringin

diawasi oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Sampit [sekarang menjadi ibukota Kabu-paten Kotawaringin Timur], dan sejak awal abad XX, seorang *Controleur* berdomisil di Pangkalan Bun, ibukota kerajaan Kota-waringin.

Dari beberapa fakta sejarah, dapat kita lihat bahwa historiografi Kotawaringin pada abad XIX memiliki dua masalah utama: politik dan ekonomi. Dari sudut pandang politik, eksistensi kerajaan pada masa kolonial tetap dipandang penting oleh pemerintah Batavia, yang memberinya se-buah otonomi, namun bagaimana kandu-ngan otonomi itu, sampai sekarang tidak benar-benar jelas. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui, otonomi macam apa yang diperoleh raja Kotawaringin. Dalam kerangka otonomi itu pula perlu diung-kapkan secara persis bagaimana sistem birokrasi traditional tetap berfungsi dan sampai tingkat mana pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi terhadap masalah-masalah politik internal kerajaan itu.

Dari sudut pandang lain, kita sudah mafhum, bahwa interes kolonialisme, jika kita mengecualikannya dari alasan politik, terutama berangkat dari dorongan ekonomi. Di sini, kami ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana politik kolonial dimanifestasikan dalam eksploitasi sumber-sumber ekonomi daerah itu, sebaliknya, dengan cara apa penguasa Kotawaringin mengadaptasikan dirinya dalam sistem ekonomi kolonial tersebut.

Untuk memahami secara keseluruhan sejarah politik dan ekonomi Kotawaringin tersebut, kita juga tidak bisa memisahkannya dari masalah « pedalaman », yang perannya sangat penting sebagai pemasok komoditas perdagangan, bagaimana sebenarnya hubungan antara orang pesisir yang mengaku diri mereka ras

Melayu dengan orang Dayak di pesisir; hubungan yang terjalin sejak abad XVII, sekurang-kurangnya, dengan kewajiban pembayaran « upeti » atau « asil », dari orang Dayak kepada raja Melayu di pesisir. Dapatlah kita tekankan secara detil, bahwa baik orang Melayu maupun orang Dayak mempunyai pandangan yang berbeda tentang masalah itu. Raja menganggap bahwa pembayaran upeti sebagai bukti pengabdian terhadap penguasa dan « pelindung rakyat », tetapi sebaliknya, orang Dayak memandang bahwa « upeti » tidak lebih dari sebuah « penghambaan » yang terpaksa dilakukannya, karena raja, yang berasal dari dinasti Banjar, menguasai pusat distribusi di wilayah itu, yang terutama terkonsentrasi di muara-muara sungai. Demikianlah alasannya, mengapa kami ingin memahami kondisi hubungan kedua kelompok masyarakat itu, apakah selalu menimbulkan konflik, atau sebaliknya, terdapat suatu konsiliasi untuk memenuhi kepentingan bersama.

Orde kolonial di Kotawaringin

Harus diakui bahwa untuk memahami sejarah Indonesia pada masa kolonial, kita tidak bisa melepaskan diri dari gejala-gejala sejarah yang terjadi di belahan barat benua Eropa. Salah satu peristiwa penting itu adalah ketika Eropa dilanda revolusi pada akhir abad XVIII, pada masa mana Perancis berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte dan Belanda masuk ke dalam wilayah kedaulatan Perancis. Pada awal abad XIX, pengaruhnya mulai terasa terutama di Jawa. Daendels, di Batavia, yang diangkat Gubernur oleh Bonaparte menerapkan *rodi* [kerja paksa] segera setelah perusahaan dagang Belanda, VOC, diambil alih oleh negara. Jawa pada saat

itu segera menjadi ajang persaingan segi tiga antara Belanda, Perancis dan Inggris. Dalam persaingan itu, Inggris berhasil menguasai kepulauan di bawah Sir Thomas Stamford Raffles, yang menggantikan *rodi* dengan sistem *landrent*. Namun perjanjian Vienne [Wina] tahun 1815 memaksa Inggris, sejak tahun 1816, mengembalikan Jawa ke tangan Belanda. Tetapi sistem Raffles tetap dilanjutkan oleh Dirk van Hogendorp, Gubernur Jenderal baru. Sistem *landrent* baru tamat riwayatnya ketika Van den Bosch, pada tahun 1830, menerapkan *culturstelsel*.

Pulau Kalimantan juga tidak luput dari persaingan itu. Konflik Inggris dan Belanda dalam monopoli perdagangan di Kalimantan sejak abad XVII harus segera diselesaikan mulai awal abad XIX. Untuk Inggris, tujuan utamanya adalah strategis. Kalimantan itu sendiri dipandang kurang memberikan keuntungan, tetapi letaknya menjadi kunci dalam jalur maritim antara India dan Cina. Maka Inggris tidak dapat mentolerir kehadiran bangsa Eropa lain terutama di bagian utara pulau itu. Sementara Belanda, motif utamanya adalah kolonial. Kehadiran kekuatan asing dan bajak laut di perairan Kalimantan dianggap ancaman bagi politik kolonialnya di seluruh kepulauan, lebih-lebih setelah mengetahui bahwa Kalimantan merupakan daerah potensial bahan tambang [emas, besi, batu bara]. Oleh karena itu, Belanda mempunyai alasan yang kuat untuk memasukkannya Kalimantan timur, selatan dan barat ke dalam wilayah *Nederlandsch-Indië*.

Dominasinya terutama terkonsentrasi di daerah pesisir, di mana terdapat pelabuhan-pelabuhan estuari sebagai pusat distribusi hasil hutan dan mineral yang sejak berabad-abad silam berada di bawah kontrol penguasa-penguasa Melayu. Sangat klasik caranya, dimulai dengan perjanjian-

perjanjian, dengan penekanan pada pengakuan kedaulatan dan penerapan sistem bagi hasil dan, apabila cara itu mendapatkan tantangan dari penguasa lokal, Belanda menyelesaikannya secara militer. Misalnya, puluhan tahun pertama abad XIX dipenuhi oleh penanda-tanganan perjanjian yang antara lain dengan sultan Pontianak, Mempawah, Sukadana, Matan, Kutei, Pasir dan Banjarmasin.

Demikian juga di Kotawaringin. Kekhususannya tampak pada cara pendekatan Belanda dengan melalui perantara Sultan Banjarmasin, leluhur raja Kotawaringin, yang dianggap masih mempunyai pengaruh besar di Kotawaringin. Dikatakan dalam perjanjian tahun 1817, diperkuat lagi dengan perjanjian tahun 1823, bahwa Sultan Sulaeman telah menyerahkan semua bekas negeri jajahan Banjar kepada pemerintah Batavia, termasuk Kotawaringin. Tetapi perjanjian itu agaknya hanya untuk mendapatkan pengakuan nominal, karena tidak ada satupun bukti bahwa Belanda mengontrol secara langsung Kotawaringin.

Satu tahun kemudian barulah Belanda membuka kontak langsung dengan raja Kotawaringin, yang dibuktikannya dengan penanda-tanganan kontrak tahun 1824, yang segera merubah nasib kerajaan Kotawaringin menjadi salah satu wilayah Hindia Belanda, dan disusul dengan perjanjian-perjanjian berikutnya.

Ada empat hal pokok berkenaan dengan politik ekonomi Belanda di Kotawaringin:

- Kotawaringin secara *de jure* masuk ke dalam wilayah juridik Hindia Belanda.
- Raja mengakui kedaulatan Gubernur Jenderal Batavia, yang untuk keperluan administrasinya, Kotawaringin berada di bawah kuasa Residen Banjarmasin.
- Belanda memang tetap membiarkan sistem pemerintahan lokal berlangsung

di Kotawaringin, tetapi pengangkatan raja, kendati tetap mengikuti « adat », keabsahannya tergantung daripada keputusan Gubernur Jenderal.

- Kotawaringin dipandang dari dua sisi: sebagai daerah sumber yang terutama hasil hutan seperti damar, rotan, tengkawang, gaharu dan lainnya dan, juga sebagai pasar bagi produk industri Eropa, terutama tekstil dan barang porselen Belanda.

Politik tersebut jelas amat berbeda dengan yang diterapkan di Jawa, di mana pemerintah Batavia menguasai sistem produksi pertanian di seluruh pulau, mengingatkan kita pada sistem yang telah diterapkan raja-raja Jawa berabad-abad silam. Berbeda dengan Jawa, raja-raja « Melayu » yang memerintah di pesisir Kalimantan amat menggantungkan ekonominya dari perdagangan dan oleh karenanya hanya mengukuhkan kekuasaannya di muara-muara sungai. Menyadari perbedaan kondisi geografi dan sosial Kalimantan, maka wajar apabila realisasi politik kolonial Belanda hanya berpusat di kota-kota pelabuhan, seperti yang berlaku di Kotawaringin, dengan mengontrol secara efektif sistem distribusi barang.

Berbeda dengan Banjarmasin, dari mana raja Kotawaringin berasal, di Kotawaringin, Belanda tidak menemukan kesulitan untuk memantapkan kedaulatannya. Malahan, raja Kotawaringin memanfaatkan kehadiran Belanda untuk kepentingan ekonomi kerajaan, pada saat mana kerajaan Kotawaringin dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan geografis dan keamanan teritorial. Pertama, ibukota yang didirikan sejak awal abad XVII oleh Pangeran Dipati Anta-Kasuma, pengasas dinasti Kotawaringin, terletak di pedalaman, yang sekarang dikenal dengan situs Kotawaringin

Lama, sekitar 100 km dari teluk Kotawaringin, sangat tidak menguntungkan bagi perdagangan maritim. Kedua, perairan Kotawaringin menjadi rute operasional bajak laut, gangguan terbesar bukan saja bagi kapal-kapal dagang, tetapi juga sewaktu-waktu menjarah ibukota. Dan ketiga, Sukamara, pelabuhan yang terletak di sungai Jelai, wilayah Kotawaringin di sebelah barat, berada di bawah kontrol kerajaan Matan, penerus dinasti Tanjungpura dan menjadi rival utama Kotawaringin di sungai Pawan.

Dengan kondisi seperti itu, pengakuan kedaulatannya terhadap Belanda adalah solusi yang positif, terutama dukungan militer dan terbukanya pasar besar di Batavia untuk komoditas hasil hutan Kotawaringin. Pada gilirannya, adalah inisiatif Pangeran Ratu Imanuddin, yang membawa perubahan penting bagi pembangunan ekonomi negeri itu. Ada tiga fakta yang telah membuktikan langkah inovatifnya:

- Ibukota dipindahkan ke Pangkalan Bun pada tahun 1811, yang diberinya nama « Bandar Sukabumi », sebuah perbukitan landai di tepi sungai Arut dan hanya 40 km jaraknya dari muara Kotawaringin.
- Di sebelah timur ibukota, pelabuhan utama dibangun di muara sungai Kumaj, pada tahun 1826, yang dapat dihubungkan dengan ibukota melalui jalan darat sepanjang 15 km. Untuk menangkal serangan bajak laut, Pemerintah Hindia Belanda lantas membangun benteng *de Percus*, pada tahun 1832 di pelabuhan itu.
- Sukamara, berkat bantuan Belanda pula, berhasil direbut dari tangan Matan, dan sejak tahun 1831 menjadi pelabuhan kedua di sebelah barat Kotawaringin.

Sepanjang abad XIX, pemerintah Hindia Belanda tetap membiarkan sistem ekonomi tradisional berlangsung, di mana penghasilan raja berasal dari « upeti », « asil » atau « serah » dari pedalaman, termasuk dari bea-cukai di pelabuhan-pelabuhan. Dalam pada itu, Belanda hanya menuntut 50% dari semua hasil bea-cukai. Tetapi sistem lama itu dipandang mengganggu kebijakan ekonomi kolonial secara global, yang pada hakekatnya ingin memperoleh barang semurah mungkin di kepulauan. Kenyataannya, Belanda menemukan kendala dengan sistem lama itu, terutama disebabkan oleh banyaknya « pungutan liar » di luar bea resmi di pelabuhan yang dilakukan oleh para pejabat kerajaan dari tingkat pusat sampai tingkat desa, atas nama raja atau bukan. Akibatnya, harga barang ekspor menjadi mahal. Demikian pula monopoli raja dan sejumlah menteri terhadap kebutuhan pokok yang diimpor, seperti garam dan tembakau, dianggap merugikan pedagang lain yang bukan dari kalangan kraton.

Maka berdasarkan perjanjian tahun 1900, sistem diganti, seluruh hasil bea-cukai menjadi kas negara, sedangkan penghasilan raja dan beberapa menteri diperoleh dari uang pengganti kerugian, yang dibayar pemerintah setiap akhir tahun. Namun kenyataannya, tanpa kontrol langsung dari pemerintah Hindia Belanda, pergantian sistem itu tidak membawa perubahan besar, pungutan liar berjalan terus, raja dan menteri-menterinya tetap melakukan kebiasaannya, bahkan sejumlah menteri memaksakan kehendaknya terhadap pedagang pengumpul hasil hutan untuk memperoleh terlebih dahulu *voorschot*. Maka sejak tahun 1913, Residen Banjarmasin menempatkan seorang *Controleur* di ibukota kerajaan, Pangkalan Bun. Peng-

awasan langsung terhadap sepak terjang raja dan menteri-nya dimulai sejak itu.

*Eksistensi sebuah « negara »
dan pertumbuhan ekonomi*

Secara garis besar, ada dua keuntungan yang didapat kerajaan Kotawaringin pada periode kolonial ini: berlanjutnya sebuah « negara » dengan sistem monarki dan keuntungan ekonomi bagi negara tersebut. Dengan status otonomi yang diberikan pemerintah Batavia, memang Kotawaringin merupakan sebuah negara dependen, di mana kekuasaan raja menjadi terbatas. Tetapi Kotawaringin tidak sendiri, negara-negara tetangganya: Pontianak, Mempawah, Sukadana dan Matan juga mengalami nasib yang sama. Di Jawa, contoh yang sama dapat kita temukan pada kesultanan Yogyakarta, kasunanan Surakarta, atau kesultanan Cirebon dan di Sumatra antara lain kesultanan Deli dan Palembang. Demikian pula di semenanjung Malaysia, di bawah dominasi Inggris, sejak tahun 1786, Laurent Metzger (1994), melihat kekuasaan sultan-sultan Melayu menjadi terbatas. Namun harus diakui, bahwa kewibawaan sultan atau raja masih tetap kuat di negerinya. Peranannya yang tetap penting, di luar masalah ekonomi pedalaman, terutama menonjol dalam mempertahankan agama dan adat-istiadat Melayu.

Dari sudut pandang ekonomi, secara statistik dapat kita catat bahwa periode kolonial justru membawa kemajuan radikal. Fenomena ini telah menjawab pandangan sebagian besar sejarawan kita, yang memandang kolonialisme Belanda telah membawa kebangkrutan politik dan ekonomi suatu negara lokal. Tetapi tidak seluruhnya tepat dikatakan terhadap Kotawa-

ringin. Indikator dari kemajuan ekonomi itu dapat dibuktikan dengan munculnya produk ekspor baru: emas, besi dan tripang, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada produk tradisionalnya, hasil hutan. Kemajuan itu juga ditandai dengan kenyataan bahwa pada tahun 1844, nilai ekspor jauh lebih besar dari impornya.

Namun harus kami katakan di sini, bahwa keuntungan ekonomi itu semata-mata hanya diperoleh oleh penduduk kota, yang dikenal dengan istilah *nyaga* [niaga]. Mereka yang termasuk golongan bangsawan kerajaan lah yang paling diuntungkan, baik dengan memperoleh keistimewaan dalam monopoli maupun dengan pengelolaan tanah-tanah *apanage* yang dihadiahkan raja. Golongan kedua adalah para pedagang, yang dengan kelebihan modal dan fasilitas di pesisir, bisa mengendalikan harga. Dengan begitu, ekonomi Kotawaringin tetap didominasi orang pesisir, sebagai pedagang perantara atau pemilik tanah-tanah *apanage*. Sementara di hulu-hulu sungai, hidup mayoritas Dayak, yang tetap tergantung pada pesisir, secara politik maupun ekonomi. Kita masih bisa menyaksikan, bahwa sampai sekarang pun, orang « Hulu » yang masih belum berubah dari masyarakat homogen dan konservatif, belum terlepas dari ketergantungannya pada pesisir.

Pengaruh kekuasaan kolonial juga tidak merubah hubungan hulu-hilir. Raja Kotawaringin, sejak awal abad XVII, telah memantapkan kekuasaannya di hulu, melalui kepala-kepala setempat yang diangkat raja, yang dikenal dengan *demung*, *mantir puluhan* atau *kanduruhan* dengan kewajiban utama merealisasikan pembayaran upeti [*serah*] atau berupa kewajiban kerja bagi raja [*tugur*], bukti dari pengakuan kedaulatan mereka atas raja Kotawaringin,

yang mengaku dirinya orang Melayu, lebih « beradab » dari suku-suku pedalaman. Kasus yang sama dapat kita jumpai di Sumatra Timur Laut. Sintesis Daniel Perret (1995) bahwa di sana orang Melayu mendominasi daerah pesisir dan orang Batak terisolir di pedalaman. Struktur hubungan hulu-hilir ini mengingatkan kita pada pendapat Kathirithamby-Wells [1993], ber-kat pengamatannya di pesisir timur Sumatra Selatan, ia sampai pada kesimpulan bahwa keberlanjutan « Negeri Melayu » di pesisir adalah tergantung kepada efektivitas hubungannya dengan pedalaman.

Dilihat dari struktur pemerintahannya, tampak bahwa Kotawaringin merepresentasikan sebuah negara besar, yang menganut dualisme « menteri utama »: di bawah raja terdapat *mangkubumi* [identik dengan *bendahara* dalam struktur pemerintahan kerajaan Melayu] dan *perdana menteri*, mengingatkan kita pada zaman kejayaan kota-kota dagang di bawah penguasa Islam pada masa pra-kolonial. Di Banten misalnya, C. Guillot (1992) menemukan adanya dua pembagian kekuasaan: *mantri jro*, diangkat dari kelas bangsawan untuk menangani masalah intern kraton dan *mantri jaba*, « orang biasa » yang menangani masalah di luar kraton.

Demikian pula dengan susunan ruang kota, di mana kraton dan kompleksnya menjadi titik pusat « peradaban » kota, tetap memperlihatkan tipe kota tradisional. Di dalam kota, raja dan para bangsawan menempatkan diri mereka pada zona eksklusif yang disebut « Kampung Raja », terletak di atas bukit yang diberi nama *Indra Kencana*, mengingatkan kita pada eksistensi kraton-kraton Jawa; simbolisasi kraton Dewa Indra di gunung Meru yang berhiaskan emas [*kencana*], sekaligus

memisahkan diri dari aktifitas perdagangan yang terkonsentrasi di tepi sungai.

Penduduk kota juga bervariasi. Di ibukota dan kota-kota pelabuhannya terdapat pemisahan berdasarkan etniknya: Banjar, Mendawai, Cina, Arab, Bugis dan Jawa. Stratifikasi sosial ditampakkan oleh susunan masyarakat yang dibedakan berdasarkan statusnya: raja dan golongan bangsawan, menempati kelas utama, sementara di bawahnya adalah mayoritas penduduk biasa yang disebut *maradehaka* [merdeka] dan yang terakhir, « budak », golongan yang dianggap paling rendah dalam stratifikasi sosial, namun keberadaannya sangat penting bagi kelas-kelas lainnya. Dilihat dari ragam etnik dan mata pencahariannya, boleh jadi ibukota menunjukkan ciri kosmopolit, tetapi tidak demikian dilihat dari jumlah penduduknya.

Pada tahun 1853, penduduk seluruh Kotawaringin hanya 13.300 jiwa dan, pada tahun 1913, memang naik, tetapi hanya mencapai 20.898 jiwa. Komposisi penduduk ini sulit buat kita untuk membayangkan Kotawaringin sebagai sebuah kota dagang besar yang kompleks. Bandingkan dengan Banten, yang sudah berpenduduk sekitar 150.000 jiwa pada tahun 1673. Di Aceh, pada awal abad XVII, sultan Iskandar Muda mampu mengerahkan sebanyak 40.000 serdadu dan Banjarmasin, penduduk kotanya saja sebanyak 32.154 jiwa pada tahun 1865. Berdasarkan data demografi itu, kita dapat menempatkan Kotawaringin ke dalam kategori negara kecil, dan hanya bisa dibandingkan dengan negara tetangganya, Matan, yang pada tahun 1915, penduduk seluruh negeri itu hanya 22.000 jiwa.

Berdasarkan heterogenitas dan struktur sosial penduduknya, memang Kotawaringin memiliki ciri kosmopolit tadi, terutama dengan kehadiran orang asing

seperti Cina, Arab, Bugis dan Jawa, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Tahun 1853, semua orang asing hanya berjumlah 160 orang dan tahun 1913 bertambah menjadi 398, yang terdiri dari 390 Cina, 2 Arab dan 6 Eropa. Meskipun demikian, mereka, seperti juga di kota-kota dagang lain di kepulauan, justru memainkan peran penting dalam bidang ekonomi. Shahbandar Kumai misalnya, sejak dibukanya pelabuhan itu, dipegang oleh keluarga Said Usman Al-Habsyi, seorang keturunan Arab. Komunitas Cina [*Hakka*] berkat konsesi raja, selain pedagang perantara, juga bekerja sebagai penambang profesional, sementara orang Bugis dan Jawa menguasai bidang perkapalan dan pelayaran antar pulau.

Demikian sedikit penduduk Kotawaringin, telah dengan sendirinya menerangkan mengapa sebagian besar jabatan-jabatan birokrasi kerajaan dipegang oleh anggota keluarga raja, padahal, di negar-negara besar seperti Aceh, Banten atau Banjarmasin sendiri, sebagian besar dipegang oleh kalangan di « luar » kraton. Misalnya untuk jabatan *perdana menteri* « eksternal » atau *mantri jaba* dalam terminologi Jawa, *tumenggung*, *panghulu* dan *perdipati menteri*. Yang menarik adalah ternyata, ikatan kekeluargaan di antara pejabat-pejabat birokrasi tidak menjamin kuatnya sebuah kerajaan, karena konflik internal sering terjadi di antara mereka. Konflik itu terutama terjadi pada saat pergantian raja. Di Kotawaringin, seperti juga di kerajaan-kerajaan lainnya, tidak ada undang-undang yang khusus mengatur prosedur suksesi, sedangkan nominasi « raja muda » untuk menaiki tahta hanyalah cara untuk mengisi kekosongan sistem itu.

Memang dalam keadaan normal, suksesi berjalan lancar, tetapi jika raja tiba-

tiba wafat, sedangkan raja muda masih belum dewasa, kekuasaan berada di tangan seorang « wali ». Pada masa transisi inilah sering timbul konflik, sesama putera raja atau kalangan keluarga dekat raja. Pemerintah Hindia Belanda melihat hal itu bisa membahayakan stabilitas kawasan. Maka di sinilah Gubernur Jenderal mampu-nyai wewenang penuh untuk menyetujui calon raja. Tujuannya, pertama untuk mencegah timbulnya kekacauan di kerajaan itu dan kedua meyakinkan agar raja terpilih nanti tetap mengakui « suzerainitas » Belanda.

Penutup

Perkenankan saya mengakhiri resume ini dengan mengingatkan, bahwa keuntungan politik dan ekonomi « Orang Melayu » adalah karena mereka berhasil membangun kerajaan dagangnya di muaramuara sungai, titik-titik strategis di mana mereka memantapkan dominasi politik dan ekonominya. Jika kerajaan Kotawaringin masih tetap bertahan sampai pertengahan abad XX, karena Belanda tidak merebut titik-titik strategis itu. Seandainya politik yang diterapkannya sama dengan di Banjarmasin, di mana mereka mendominasi pusat politik dan ekonomi kesultanan itu, sangat mungkin peran primordial orang Melayu di Kotawaringin sudah berakhir sejak awal abad XIX, seperti halnya di Banjarmasin, kota yang sejak awal abad XVI memainkan peran fundamental sebagai ibukota kesultanan, tetapi hancur pada tahun 1860, dan menjadi pusat administrasi, politik dan perdagangan Belanda untuk wilayah selatan dan timur Kalimantan di bawah nama *Residentie Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo*.

Sebaliknya, « kepangeranan » Kotawaringin, penerus dinasti raja-raja Banjar,

tetap eksis sebagai negara otonom sampai tahun 1948, saat mana raja Kotawaringin mengintegrasikan negerinya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kesatuan politik dan ekonomi bekas kerajaan itu, telah mendasari pembagian wilayah Republik Indonesia di Kalimantan, yang pada awalnya di bawah nama Kabupaten Kotawaringin dengan ibukota di Sampit, tetapi sejak tahun 1959 sampai sekarang, menjadi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang ibukotanya di Pangkalan Bun, bekas ibukota kerajaan yang didirikan pada tahun 1811 oleh Pangeran Ratu Imanuddin.

Akhirnya, saya harus menyesal, bahwa rekonstruksi sejarah yang telah kita ikuti bersama ini hanya mampu mengungkapkan bagian akhir dari sejarah yang panjang, sisanya masih dalam lembaran yang gelap. Kapan mula pertama Kotawaringin tumbuh menjadi pelabuhan, satu-satunya sumber adalah *Nagarakertagama*, yang selesai ditulis Prapanca tahun 1365, tetapi naskah Jawa kuna ini hanya menyebutkan Kotawaringin sebagai salah satu « vasal » Majapahit yang terletak di *Nusa Tanjung Negara* [Kalimantan]. Lalu kapan

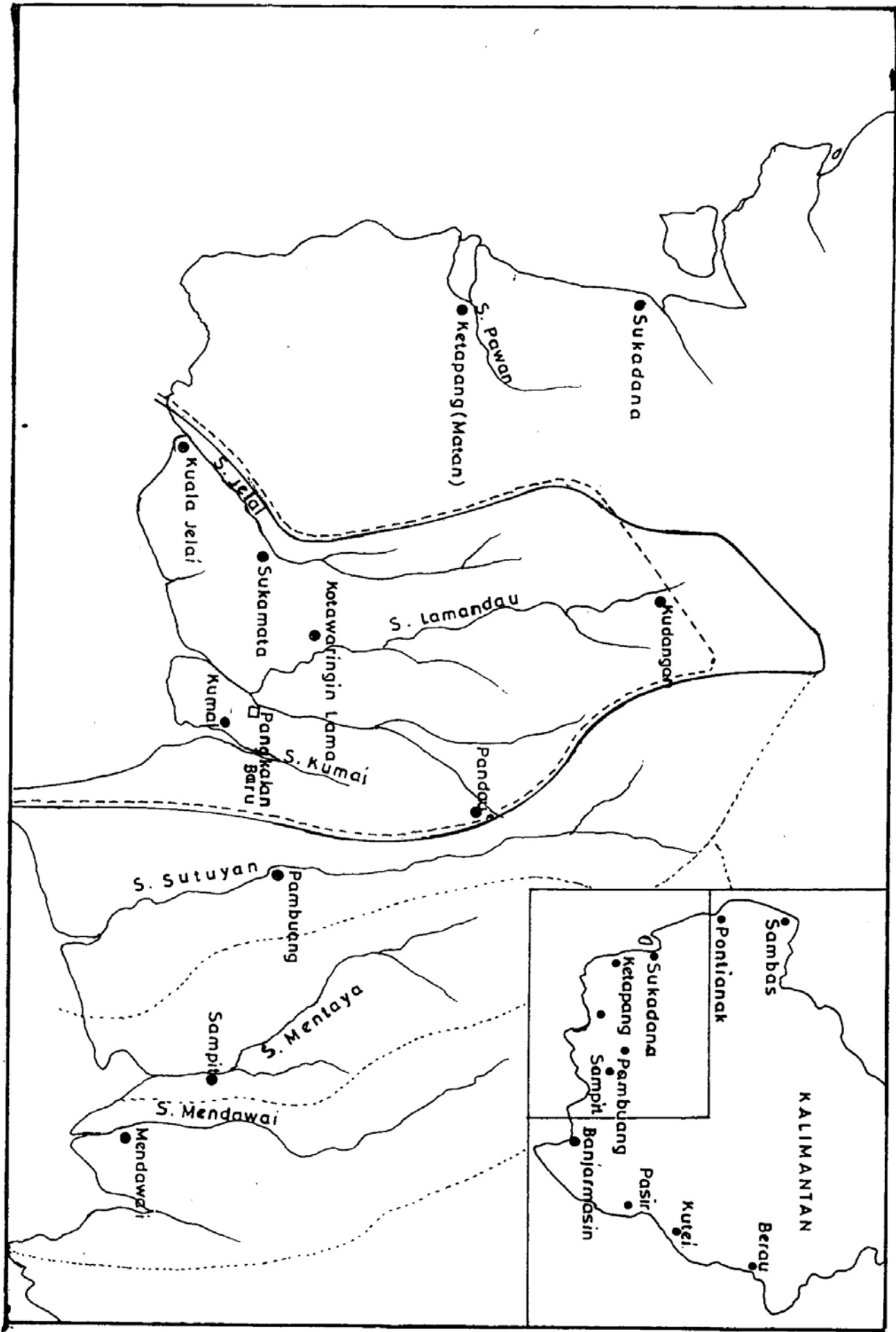
tepatnya kerajaan Islam berdiri di Kotawaringin, *Hikayat Banjar* tidak memberi jawaban yang pasti, juga sumber Belanda, *Dagh Register*, yang informasinya selalu faktual, hanya mencatat sejumlah besar produk ekspor dan impor Kotawaringin pada abad XVII, luput mencatat kejadian penting itu. Sementara hasil penggalian arkeologi, tahun 1994 yang kami lakukan bersama tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, di Kotawaringin Lama, hanya mampu memberi kita sejumlah besar pecahan keramik, yang sering bisa memberi pertanggalan relatif, namun ditemukan dalam keadaan teraduk antara pecahan Song dan Yuan [abad XII-XIV], Ming, Sawankhalok, Sukhotai dan Vietnam [abad XIX-XVI] sampai dengan pecahan *Nyonyaware* dan *Maastricht* [abad XIX]. Kedua pertanyaan di atas akan tetap menanti jawaban kita. Dan, saya ingin mengatakan, thesis ini hanya tahap awal dari sebuah penelitian (Moh.Ali FADILLAH) ■

PARIS, LE 12 DECEMBRE 1996

BIBLIOGRAFI PILIHAN

- Cense, A.A. 1928. *De kroniek van Bandjarmasin*, Leiden: Santpoort (NH).
- Dijk, L.C.D. van. 1862. *Nederlandsch vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam en Cochinchine*, Amsterdam.
- Guillot, C. 1989. « La population du sud de Bornéo à la fin du XVII^e siècle d'après le témoignage des théatins », *MEFRIM*, tome 101-2, pp. 925-952.
- _____ 1992. « Libre entreprise contre économie dirigée, guerre civile à Banten », *Archipel*, 43, pp. 57-72.
- Kathirithamby-Wells. 1993. « *Hulu-hilir* unity and conflict: Malay statecraft in East Sumatra before the mid-nineteenth century », *Archipel*, 45, 77-95.
- Lombard, D. 1979. « Regard nouveau sur les pirates malais (I^{ère} moitié du XIX^e siècle) », *Archipel*, 18, pp. 231-249.
- Mallinckrodt, J. 1923. De Dorps offerplaats bij de Dajaks van Kota Waringin, *Koloniaal Tijdschrift*, 23e jaargang pp. 523-547.
- _____ 1925. « Een en Ander over de Gebruiken aan het Kotawaringinsch Hof », *Koloniaal Tijdschrift*, 14e jaargang, pp. 263-301.
- Metzger, Laurent. 1994. *Les sultanats de Malaisie, un régime monarchique au XX^e siècle*, Paris: L'Harmattan.
- Meyer, J.J. 1899. « Bijdragen tot de Kennis der Geschiedenis van het Voormalig Bandjermasinsche Rijk, thans Residentie Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo », *De Indische Gids*, 21e jaargang, pp. 257-280.
- Noorlander, J. C. 1935. *Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede half der 18de eeuw*, Leiden.
- Perret, Daniel. 1995. *La formation d'un paysage ethnique, Batak & Malais de Sumatra-Nord-Est*, Paris: EFEO.
- Pijnappel GZN., J. 1860. « Beschrijving van het westelijke gedeelte van de Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo », *BKI*, 7, pp. 243-346.
- Ras, J.J. 1990. *Hikayat Banjar*, 2nd ed., Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rees, W. A. van. 1865-7. *De Bandjarmasinsche Krijg van 1859-1863*, Arnhem.
- Roy, J.J. de. 1705. *Voyage gedaan door Jacob Janszen de Roy na Borneo en Atchin in't jaar 1691 en vowelgens*, Leiden: Pieter van der Aa.
- Veth, P. J. 1854-6. *Borneo's Westerafdeeling, Geographische, Statistisch, Historisch, Voorafgegan door Algemeeneschets der bandschen Eilands*, vol. I, Zeltbommel.
- Willer, J. T. 1857. « Eerste proeve eener kronijk van Mempawa en Pontianak », *TBG*, VI, pp. 69-74.





Peta Kerajaan Kotawaringin Pada Abad XIX

